MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2020
Menko Polhukam

MOH.MAHFUD MD

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%
Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	78
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Jumlah Anggaran: Rp. 282.769.824.000,-
(Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2020
Menko Polhukam

MOH.MAHFUD MD

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA
MENKO POLHUKAM

Sasaran Strategis	Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)
Definisi Sasaran Strategis	Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam serta melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan publik
Indikator Kinerja	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Definisi	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional adalah upaya Kemenko Polhukam mendorong capaian kinerja pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dalam rangka mendukung pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan serta pelayanan publik dalam dokumen perencanaan nasional yang telah ditetapkan meliputi: 1. Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia merupakan Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). 2. Indeks Citra Indonesia di mata Dunia Internasional Indeks Citra Indonesia dimata dunia internasional

	adalah persepsi yang dipercayai/diyakini *stakeholder* eksternal terhadap Indonesia yang didasarkan kepada kemampuan yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan Internasional yang terbangun berdasarkan *power* yang dimiliki baik yang bersifat hard maupun soft. 3. Indeks Pembangunan Hukum Indeks Pembangunan Hukum merupakan indeks untuk mengukur intervensi program dan kegiatan/capaian kebijakan pemerintah pada kementerian/lembaga bidang hukum, yang direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan Nasional berdasarkan sasaran strategis dan arah kebijakan bidang hukum RPJMN 2020-2024, dimana sasaran strategis ditetapkan menjadi aspek dan arah kebijakan ditetapkan menjadi variabel. 4. Indeks Perilaku Anti Korupsi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah metode pengukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 (kecuali tahun 2016). 5. Terpenuhinya Kekuatan Pokok Minimum Essential Force (MEF) Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi. 6. Tingkat Kriminalitas Tingkat kriminalitas merupakan indikator yang dapat representasi tingkat keamanan di Indonesia diukur melalui kuantitas kelompok atau komunitas yang melakukan pelanggaran hukum hukum atau pelanggaran pidana, sehingga memengaruhi keseimbangan sosial dalam masyarakat.

	7. Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan indeks yang mengukur keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing dalam suatu daerah. 8. Skor Global Cybersecurity Index *Global Cyber Security Index* (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota International Telecommunication Union (ITU) terhadap peningkatan kesadaran *cybersecurity*. GCI membahas seputar *Global Cybersecurity* Agenda dari ITU dengan 5 (lima) pilar yaitu: a. Legal (hukum) b. Technical (teknis) c. Organizational (organisasi) d. Capacity Building (pengembangan kapasitas) e. Cooperation (kerja sama) 9. Instansi Pemerintah dengan indeks RB Baik keatas Indeks RB merupakan indeks yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur Tata Kelola instansi pemerintah yang diukur melalui 8 area perubahan Reformasi Birokrasi.
Sumber Data	1. Badan Pusat statistik (BPS) 2. Kementerian Luar Negeri 3. Badan Pusat Statistik (BPS) 4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 5. Kementerian Pertahanan 6. Polri 7. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 8. International Telecommunication Union (ITU) 9. Kementerian PAN RB

Cara Menghitung	∑ = ((Jumlah capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik) dibagi (Target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada dokumen perencanaan nasional))x 100%
Sasaran Strategis	Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik
Definisi Sasaran Strategis	Tata kelola Kemenko Polhukam yang baik adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi menuju kearah yang lebih baik
Indikator Kinerja 1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
Definisi	Penilaian Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sesuai Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Terdapat 8 area perubahan yang menjadi penilaian dalam Reformasi Birokrasi yaitu Area Manajemen Perubahan, area penataan dan penguatan organisasi, area penataan peraturan perundang-undangan, area penataan sumber daya manusia, area penataan tata laksana, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas kerja, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik
Sumber Data	Kemenpan RB
Cara Menghitung	Skor dikeluarkan oleh Tim Penilai RB dengan melihat upaya perbaikan dari 8 area perubahan RB dengan skala skor 1 - 100
Indikator Kinerja 2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja

	instansi Pemerintah. Komponen dalam penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kemenko Polhukam yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data	Kemenpan RB
Cara Menghitung	Penilaian berasal dari Tim Penilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenpan RB berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori penilaian sebagai berikut: 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam
Definisi	Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. 4 (empat) opini BPK, yaitu : WTP, WDP, adversed, dan disclaimer.
Sumber Data	laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI
Cara Menghitung	penilaian yang berasal dari BPK RI atas Laporan Keuangan

MENKO POLHUKAM

MOH. MAHFUD MD